



Pengaruh Belanja Infrastruktur, Pajak, Pendidikan dan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa

Khairuna Safira^{1*}, Rinaldi Syahputra², Safuridar³

¹⁻³Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudra, Indonesia

Email: khairunasafira18@gmail.com¹, rinaldisyahputra@unsam.ac.id², safuridar@unsam.ac.id³

*Penulis Korespondensi: khairunasafira18@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effects of infrastructure spending, local taxes, education, and inflation on income inequality in Langsa City. The study employs a quantitative approach using secondary time-series data covering the 2006–2025 period, obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Langsa City and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The data were analyzed using multiple linear regression, supported by classical assumption tests, including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The results indicate that infrastructure spending has a positive but insignificant effect on income inequality, while local taxes also have a positive but insignificant effect. Education has a negative but insignificant effect, whereas inflation has a negative and significant effect on income inequality. Simultaneously, infrastructure spending, local taxes, education, and inflation have a significant effect on income inequality. These findings suggest that income inequality in Langsa City is shaped by interconnected fiscal, social, and economic factors associated with regional development and local economic*

Keywords: *Education; Inequality; Inflation; Infrastructure; Tax.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja infrastruktur, pajak daerah, pendidikan, dan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk time series periode 2006–2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, didukung uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja infrastruktur berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, pajak daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, pendidikan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan, belanja infrastruktur, pajak daerah, pendidikan, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Langsa dipengaruhi oleh kombinasi faktor fiskal, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan kondisi pembangunan dan perekonomian daerah di Kota Langsa secara keseluruhan dalam periode penelitian yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Inflasi; Infrastruktur; Ketimpangan; Pajak; Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi karena menunjukkan sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Di Provinsi Aceh, rasio Gini mengalami penurunan dari 0,29 pada tahun 2022 menjadi 0,28 pada tahun 2024. Meskipun berada pada tingkat ketimpangan relatif rendah, kondisi tersebut belum menggambarkan pemerataan yang sepenuhnya merata karena masih terdapat perbedaan distribusi pendapatan antarwilayah dan kelompok masyarakat (Noviar et al., 2025). Kondisi tersebut menjadi lebih menarik ketika dilihat pada Kota Langsa. Sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah pesisir timur Aceh, Kota Langsa berkembang melalui aktivitas perdagangan, jasa, pertanian, dan usaha kecil. Perkembangan aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pendapatan. Data menunjukkan rasio Gini Kota Langsa berfluktuasi dari 0,30 pada 2008 menjadi 0,33 pada 2009, kemudian

turun menjadi 0,32 pada 2010, meningkat cukup tajam menjadi 0,37 pada 2011, dan kembali turun menjadi 0,34 pada 2012. Pola tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan tidak bergerak secara konsisten menurun, bahkan mencapai tingkat tertinggi pada 2011 sebelum kembali mengalami penurunan. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi Kota Langsa yang memiliki perbedaan karakteristik ekonomi antara masyarakat yang bekerja pada sektor perdagangan dan jasa dengan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian serta pekerjaan berpendapatan relatif rendah. Kajian mengenai Aceh juga menunjukkan bahwa Kota Langsa pernah memiliki rasio Gini tertinggi di antara kabupaten/kota di Aceh, yang mengindikasikan adanya kesenjangan distribusi pendapatan yang perlu mendapat perhatian.

Fenomena ketimpangan tersebut berlangsung bersamaan dengan perubahan belanja infrastruktur daerah. Belanja infrastruktur meningkat dari Rp66,31 miliar pada 2008 menjadi Rp69,60 miliar pada 2009, kemudian sedikit menurun menjadi Rp69,04 miliar pada 2010 dan meningkat cukup besar menjadi Rp82,66 miliar pada 2011. Namun, ketika rasio Gini mencapai 0,37 pada 2011, belanja infrastruktur justru berada pada nilai tertinggi selama periode tersebut. Pada 2012, belanja infrastruktur turun tajam menjadi Rp47,05 miliar, sedangkan rasio Gini juga menurun menjadi 0,34. Pergerakan yang tidak selalu searah tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan belanja infrastruktur belum secara otomatis menghasilkan pemerataan pendapatan dalam jangka pendek.

Fenomena serupa terlihat pada penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah turun tipis dari Rp3,04 miliar pada 2008 menjadi Rp2,97 miliar pada 2009, kemudian meningkat menjadi Rp3,99 miliar pada 2010 dan Rp5,10 miliar pada 2011, serta relatif stabil pada Rp5,10 miliar pada 2012. Peningkatan penerimaan tersebut menunjukkan semakin besarnya kapasitas fiskal daerah, tetapi pada saat penerimaan pajak meningkat, ketimpangan juga sempat mencapai 0,37 pada 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan sumber pendapatan daerah belum dapat langsung dipahami sebagai pemerataan pendapatan masyarakat karena dampaknya sangat berkaitan dengan arah penggunaan dan prioritas kebijakan fiskal.

Dari sisi pendidikan, persentasenya meningkat dari 38,55% pada 2008 menjadi 39,20% pada 2009, 40,13% pada 2010, dan mencapai 42,75% pada 2011, sebelum sedikit menurun menjadi 42,21% pada 2012. Peningkatan pendidikan secara teoritis dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan peluang memperoleh pendapatan, tetapi peningkatan tersebut juga belum berjalan searah dengan penurunan ketimpangan karena rasio Gini justru mencapai 0,37 pada 2011. Sementara itu, inflasi menunjukkan pola yang lebih berfluktuasi, yaitu 13,78% pada 2008, turun menjadi 3,96% pada 2009, meningkat menjadi 7,19% pada 2010, kemudian

menurun menjadi 3,55% pada 2011 dan 0,39% pada 2012. Perubahan tersebut penting diperhatikan karena tekanan harga dapat memengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat dan daya beli kelompok berpendapatan rendah.

Rangkaian data tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Langsa memiliki fenomena yang tidak sederhana. Perubahan belanja infrastruktur, penerimaan pajak daerah, pendidikan, dan inflasi tidak selalu diikuti perubahan rasio Gini dalam arah yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menguji secara empiris apakah perubahan kebijakan fiskal, pembangunan sumber daya manusia, dan kondisi ekonomi daerah benar-benar berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Langsa.

2. KAJIAN TEORITIS

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan (*income inequality*) merupakan isu global utama yang dipicu oleh distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang, mekanisme pasar yang tidak adil, serta kebijakan publik termasuk perpajakan yang cenderung memihak kelompok kaya (Prastowo, 2014). Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan kepemilikan faktor produksi, dampak globalisasi, dan kemajuan teknologi yang memprioritaskan tenaga kerja berketerampilan tinggi (Nurhayati et al., 2024). Di tingkat daerah, ketimpangan antarprovinsi merefleksikan kinerja pemerintah, sehingga efektivitas pengelolaan APBD dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah menjadi krusial dalam meminimalisir kesenjangan tersebut (Chayyani, 2021). Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, instrumen yang umum digunakan adalah Kurva Lorenz yang menyandingkan pendapatan aktual dengan distribusi ideal serta Rasio Gini (Nurhayati et al., 2024). Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna), dengan kategori ketimpangan rendah ($<0,3$), sedang ($0,3 - 0,5$) dan tinggi ($>0,5$) (Wibowo, 2016; Nurhayati et al., 2024).

Belanja Infrastruktur

Belanja infrastruktur merupakan pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun fasilitas fisik dan non-fisik yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup, serta kesejahteraan sosial (Azka et al., 2024). Jenis infrastruktur daerah mencakup sektor transportasi, telekomunikasi, energi, sanitasi, dan fasilitas sosial, di mana tingkat ketersediaannya bervariasi antarwilayah yang dipengaruhi oleh kebijakan, kondisi geografis, dan sumber daya (Azka et al., 2024). Wilayah perkotaan umumnya memiliki infrastruktur yang lebih modern dibanding wilayah pedesaan, sehingga diperlukan perencanaan infrastruktur yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal (Azka et al., 2024).

Ketersediaan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya dan produktivitas, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi domestik maupun asing, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Kamuli et al., 2023; Azka et al., 2024). Pembangunan infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mempromosikan pemerataan pembangunan urban-rural, merangsang adopsi teknologi digital, serta memperkuat stabilitas sosial-politik (Azka et al., 2024). Kendati demikian, pembangunan skala besar berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan disrupsi sosial. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat, serta komitmen keberlanjutan untuk memitigasi risiko tersebut (Azka et al., 2024).

Pajak daerah merupakan pilar utama dalam sistem keuangan otonomi daerah di Indonesia, yang didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan dan pelayanan publik (Oktavilia et al., 2020). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah bersumber dari kewenangan daerah itu sendiri dengan menerapkan asas manfaat, kemampuan bayar, dan kesederhanaan (Oktavilia et al., 2020).

Secara teoritis, pajak daerah memiliki empat fungsi pokok (Oktavilia et al., 2020): Fungsi Anggaran (*Budgetair*): Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pengeluaran/belanja daerah. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*): Mengarahkan perilaku dan aktivitas ekonomi masyarakat regional. Fungsi Redistribusi: Meminimalisir kesenjangan sosial dan mendorong pemerataan pendapatan. Fungsi Stabilisasi: Menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi daerah dari fluktuasi ekonomi.

Pendidikan

Pembangunan infrastruktur pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang bersifat resiprokal (*reciprocal relationship*) atau saling mempengaruhi (Bado et al., 2017). Peningkatan kualitas sumber daya manusia (human capital) melalui perkembangan pendidikan membutuhkan alokasi investasibaik secara individu maupun publik yang kapasitasnya ditentukan oleh tingkat perekonomian suatu masyarakat atau negara (Bado et al., 2017). Sebaliknya, kualitas human capital yang meningkat akan mendorong produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat dalam produksi, konsumsi, dan distribusi (Bado et al., 2017).

Secara empiris, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi suatu negara (Bado et al., 2017). Selain menjadi pendorong pertumbuhan, pendidikan berperan signifikan dalam mereduksi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan,

yang pada akhirnya meminimalisir masalah sosial seperti angka kriminalitas, terorisme, dan pekerja anak (Bado et al., 2017).

Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu, yang mengakibatkan penurunan daya beli mata uang serta membengkaknya biaya produksi dan operasional bagi pelaku usaha (Rangkuty et al., 2024).

Sebagai fenomena ekonomi global, inflasi yang tinggi berpotensi menggeser preferensi masyarakat dari berinvestasi pada lembaga keuangan menjadi lebih memilih aktivitas kerja langsung (Rangkuty et al., 2024). Menurut Rangkuty et al., (2024), hal ini dipicu oleh tiga dampak utama inflasi, yaitu: Menurunnya efisiensi dan produktivitas kegiatan produksi. Meningkatnya biaya modal (*cost of capital*). Meningkatnya ketidakpastian (*uncertainty*) terhadap estimasi biaya dan pendapatan di masa depan.

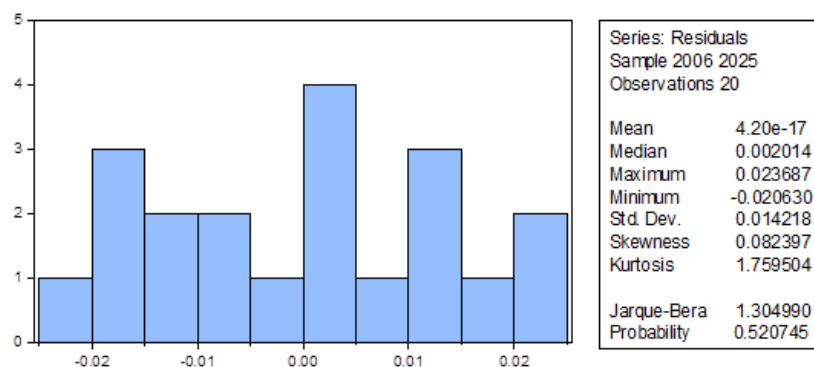
3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis (uji t, uji F, koefisien determinasi). Data bersumber dari berbagai institusi pemerintah terutama, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan *Jarque-Bera*, dengan kriteria nilai probabilitas $> 0,05$.



Sumber: Hasil Pengolahan EViews 10 (2026)

Gambar 1. Uji Normalitas.

Berdasarkan Gambar 1, diperoleh nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,520745. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,520745 > 0,05$), sehingga residual berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan mengetahui adanya korelasi antarvariabel independen. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Centered VIF*, dengan kriteria $VIF < 10$.

Tabel 1. Uji Multikolinearitas.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.043634	3408.196	NA
LOGBELANJAINFR...	3.11E-05	1548.197	1.237490
LOGPAJAK	6.18E-05	2522.016	2.440257
PENDIDIKAN	5.59E-07	99.66142	2.988912
INFLASI	1.84E-06	5.379374	1.550144

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 10 (2026)

Hasil pengujian menunjukkan nilai *Centered VIF* Belanja Infrastruktur (X_1) sebesar 1,237490, Pajak (X_2) 2,440457, Pendidikan (X_3) 2,988912, dan Inflasi (X_4) 1,550144. Seluruh nilai berada di bawah 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual. Pengujian dilakukan menggunakan *Breusch-Pagan-Godfrey*, dengan kriteria Prob. *Chi-Square* $> 0,05$.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas.

Test	Value	Probability
F-statistic	1.416559	Prob. F(4,15) = 0.2763
Obs*R-squared	5.483567	Prob. Chi-Square(4) = 0.2412
Scaled explained SS	1.171347	Prob. Chi-Square(4) = 0.8828

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 10 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh Prob. *Chi-Square* sebesar 0,2412. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,2412 > 0,05$), sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui adanya korelasi residual antarperiode. Pengujian dilakukan menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*, dengan kriteria Prob. *Chi-Square* $> 0,05$.

Tabel 3. Uji Autokorelasi.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1.917030	Prob. F(2,13)	0.1864
Obs*R-squared	4.555122	Prob. Chi-Square(2)	0.1025

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 10 (2026)

Hasil pengujian menunjukkan nilai Prob. *Chi-Square* sebesar 0,1025. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,1025 > 0,05$), sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Uji t (parsial)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Ketimpangan Pendapatan secara parsial dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil estimasi secara parsial dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.057547	0.208888	0.275492	0.7867
LOGBELANJAINFRASTRUKTUR	0.002914	0.005579	0.522385	0.6090
LOGPAJAK	0.012745	0.007863	1.620873	0.1259
PENDIDIKAN	-0.001231	0.000748	-1.645856	0.1206
INFLASI	-0.003732	0.001356	-2.753039	0.0148
R-squared	0.473858	Mean dependent var		0.345000
Adjusted R-squared	0.333554	S.D. dependent var		0.019601
S.E. of regression	0.016002	Akaike info criterion		-5.219921
Sum squared resid	0.003841	Schwarz criterion		-4.970988
Log likelihood	57.19921	Hannan-Quinn criter.		-5.171326
F-statistic	3.377356	Durbin-Watson stat		2.527590
Prob(F-statistic)	0.036869			

Sumber: Hasil Pengolahan EViews 10 (2026)

Nilai koefisien Belanja Infrastruktur sebesar 0.002914 dengan nilai probabilitas 0,6090 $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Infrastruktur berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa. Secara teoritis, belum signifikannya pengaruh ini disebabkan oleh belum meratanya pemanfaatan hasil pembangunan, adanya jeda waktu (*time lag*) efek ekonomi, serta dominasi faktor lain seperti kesempatan kerja dan investasi.

Nilai koefisien Pajak sebesar 0,012745 dengan nilai probabilitas $0,1259 > 0,05$. Artinya, Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa. Meskipun secara teoritis pajak berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan, penerimaan pajak di Kota Langsa belum memberikan pengaruh nyata akibat masih terbatasnya

kontribusi pajak daerah serta alokasi anggaran yang belum optimal menyasar kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Nilai koefisien Pendidikan sebesar 0,001231 dengan nilai probabilitas $0,1206 > 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa Pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa. Peningkatan kualitas modal manusia (*human capital*) belum mampu menurunkan ketimpangan secara signifikan karena belum diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang sesuai serta belum meratanya kualitas pendidikan di daerah.

Nilai koefisien Inflasi sebesar 0,003732 dengan nilai probabilitas $0,0148 < 0,05$. Hasil ini membuktikan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa. Pengaruh negatif ini terjadi karena peningkatan inflasi periode penelitian didorong oleh kenaikan aktivitas ekonomi dan komoditas basis, yang turut meningkatkan pendapatan masyarakat lapisan bawah sehingga memperkecil kesenjangan pendapatan.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel Belanja Infrastruktur, Pajak, Pendidikan, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Ketimpangan Pendapatan. Hasil regresi menunjukkan nilai *Prob(F-statistic)* sebesar $0,036869 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Belanja Infrastruktur, Pajak, Pendidikan, dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil regresi menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,333554. Artinya, sebesar 33,35 % variasi Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa dapat dijelaskan oleh variabel Belanja Infrastruktur, Pajak, Pendidikan, dan Inflasi, sedangkan sisanya sebesar 66,65 dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi (seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan investasi).

Pembahasan

Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Belanja Infrastruktur memiliki koefisien sebesar 0,002914 dengan nilai probabilitas $0,6090 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Infrastruktur berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa.

Secara teoritis, belanja infrastruktur bertujuan meningkatkan konektivitas dan pemerataan akses ekonomi. Namun, belum signifikannya pengaruh variabel ini di Kota Langsa

disebabkan oleh adanya jeda waktu (*time lag*) dari dampak pembangunan, serta alokasi anggaran yang belum sepenuhnya terarah pada sektor pembuat pemerataan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan Sigiyo (2023) dan Ardiyanti (2022) yang menegaskan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur dalam mereduksi ketimpangan sangat bergantung pada ketepatan alokasi anggaran dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa

Variabel Pajak Daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0,012745 dengan nilai probabilitas $0,1259 > 0,05$. Hasil statistik ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa.

Meskipun pajak daerah berfungsi sebagai instrumen fiskal redistributif, pengaruh yang tidak signifikan ini disebabkan oleh masih terbatasnya kontribusi pajak daerah terhadap kapasitas fiskal total Kota Langsa. Selain itu, alokasi penerimaannya belum optimal menjangkau masyarakat berpendapatan rendah. Temuan ini mendukung penelitian Liyana et al., (2024) serta Sari & Qibthiyya (2022), yang menyatakan bahwa struktur pajak daerah masih didominasi sektor konsumtif dan belum mampu menjadi instrumen utama redistribusi pendapatan tanpa didukung program belanja sosial yang tepat.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa

Hasil estimasi menunjukkan variabel Tingkat Pendidikan bernilai koefisien 0,001231 dengan nilai probabilitas $0,1206 > 0,05$. Artinya, Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa.

Secara konseptual, pendidikan merupakan investasi modal manusia (*human capital*). Namun, tidak signifikkannya variabel ini mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata pendidikan masyarakat Kota Langsa belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja akibat adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi lulusan dan ketersediaan lapangan kerja. Temuan ini sejalan dengan Laila et al., (2024), yang mengemukakan bahwa dampak pendidikan terhadap penurunan ketimpangan membutuhkan waktu jangka panjang dan sangat bergantung pada struktur pasar kerja lokal.

Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa

Variabel Inflasi menghasilkan koefisien sebesar -0,003732 dengan nilai probabilitas $0,0148 < 0,05$. Hasil ini membuktikan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa.

Meskipun secara umum inflasi menurunkan daya beli, pengaruh negatif di Kota Langsa terjadi karena inflasi periode penelitian dipicu oleh kenaikan harga komoditas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kenaikan harga jual komoditas tersebut meningkatkan pendapatan

kelompok masyarakat lapisan bawah (petani dan nelayan), sehingga memperkecil kesenjangan pendapatan dengan kelompok atas. Hasil ini mendukung temuan Wirda (2020) dan Reza et al., (2025), yang menyatakan bahwa inflasi yang terkendali pada sektor basis dapat mendorong pendapatan masyarakat bawah dan mereduksi ketimpangan.

Pengaruh Belanja Infrastruktur, Pajak Daerah, Tingkat Pendidikan, dan Inflasi Secara Simultan

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai *Prob(F-statistic)* sebesar $0,0368 < 005$. Dengan demikian, Belanja Infrastruktur, Pajak Daerah, Tingkat Pendidikan, dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa, sehingga hipotesis kelima diterima.

Secara teoritis, ketimpangan pendapatan merupakan hasil interaksi multisektoral antara kebijakan fiskal, investasi modal manusia, dan stabilitas makroekonomi. Temuan ini memperkuat penelitian Wahyudi (2023) & Cupian (2025), yang menegaskan bahwa upaya penanggulangan ketimpangan pendapatan memerlukan sinergi komprehensif antara pengalokasian anggaran publik, efektivitas pajak, peningkatan kualitas SDM, serta pengendalian stabilitas harga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menyimpulkan bahwa secara simultan Belanja Infrastruktur, Pajak Daerah, Tingkat Pendidikan, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Langsa. Secara parsial, Belanja Infrastruktur dan Pajak Daerah berpengaruh positif tidak signifikan karena manfaat pembangunan belum merata dan fungsi redistribusi pajak belum optimal, Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan akibat keterbatasan penyerapan pasar kerja, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan karena kenaikan harga pada sektor basis justru meningkatkan pendapatan masyarakat bawah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Langsa disarankan untuk mengarahkan alokasi infrastruktur dan penerimaan pajak secara pemerataan, menyelaraskan pendidikan dengan dunia kerja, serta menjaga stabilitas inflasi, sementara peneliti selanjutnya dianjurkan memperpanjang periode amatan dan menambahkan variabel seperti pengangguran, kemiskinan, atau investasi.

DAFTAR REFERENSI

- Andini, T. D., Rohman, M. F., & M. (2026). Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 6(1), 17–24. <https://doi.org/10.47233/jebs.v6i1.3765>
- Ardiyanti, N. L. G. M. (2022). Pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, investasi, dan biaya pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 12(7), 503–517.
- Azka, C. N., Aprilia, N. A., Prima, L., Rahmawati, K., Sari, N., Ma'arif, G. Z., Praja, S. W., & Hardono, S. (2024). *Pemantapan infrastruktur daerah*. CV Media Sains Indonesia.
- Bado, B., Hasbiah, S., Hasan, M., & Alam, S. (2017). *Model kebijakan belanja pemerintah sektor pendidikan dalam perspektif pembangunan ekonomi*. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Buku Carabaca. <https://eprints.unm.ac.id/4866/>
- Bakhtiari, S., & Meisami, H. (2010). An empirical investigation of the effects of health and education on income distribution and poverty in Islamic countries. *International Journal of Social Economics*, 37(4), 293–301.
- Chayyani, N. R. (2021). *Ketimpangan pendapatan dan pemulihan ekonomi nasional*. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. <https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2021/11/Ketimpangan-Pendapatan-dan-PEN-Nuri.pdf>
- Cupian, C., Hakim, A. L., Hardiawan, D., & R. R. (2025). *Determinasi ketimpangan pendapatan di Indonesia: Peran pendidikan, zakat, dan korupsi*.
- Farida, D., & Riofita, H. (2025). Peran pajak progresif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal*, 9(2), 15940–15943.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iklima, N., Wahyuni, S., & Rizkina, A. (2025). The influence of infrastructure and economic growth on income inequality in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 4(6). <https://doi.org/10.54443/ijset.v4i6.746>
- Kardita, A. A. G. D., Setiawina, N. D., & Budiasa, I. G. S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, DAU, dan share ekspor impor terhadap PDRB terhadap ketimpangan pendapatan rumah tangga di Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 1777–1802.
- Laila, N. N., Dai, S. I. S., Canon, S., & Abdul, I. (2024). Analisis pengaruh pengeluaran per kapita, pendidikan, dan kesehatan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2010–2019. *Jurnal*, 1(3), 59–68.
- Liyana, N. F., Wardana, A. B., Haniyah, R., Susanto, E., Selatan, T., & Selatan, T. (2024). Pengaruh pajak daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Balance Vacation Accounting Journal*.

- Noviar, H., Badli, S., & Zulbaidi, Z. (2025). Pola ketimpangan pendapatan antarkabupaten di Aceh: Pendekatan data SUSENAS. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 280–302. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1876>
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Febriani, R. F., Suparyati, A., & Kusumastuti, S. Y. (2024). *Buku referensi ekonomi pembangunan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Oktavilia, S., Fafurida, & Rahman, Y. A. (2020). *Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah*. Fastindo.
- Prastowo, Y. (2014). *Ketimpangan pembangunan Indonesia dari berbagai aspek*. International NGO Forum on Development.
- Putri, R. Y., Andiny, P., Safuridar, S., & Martahadi, M. (2024). Pengaruh peningkatan infrastruktur terhadap ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 168–183. <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.162>
- Putri, Y. D., & Aminda, R. S. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Development Economic and Digitalization*, 3(1), 87–108.
- Rangkuty, D. M., Lubis, H. P., Herdianto, & Zora, M. M. (2022). *Teori inflasi (studi kasus: Pelaku usaha rumah tangga Desa Klambir Lima Kebun sebelum dan selama pandemi Covid-19)*. Deepublish Publisher.
- Reza, M., Basunjaya, B. L., Dewanto, F. W., & Waskito, B. A. (2025). Analisis kausalitas inflasi, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 131–148.
- Rinanda, T., & Pangeran, P. (2023). The effect of inflation on income distribution. *All Fields of Science J-LAS*, 3(4), 50–56.
- Sari, D., & Qibthiyyah, R. M. (2022). Tax revenue and income inequality in Indonesia: A provincial level evidence. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(2), 155–172. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i2.326>
- Shahpari, G., & Davoudi, P. (2013). Studying effects of human capital on income inequality in Iran. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1386–1389.
- Sigiro, E. E. (2023). Peran infrastruktur dalam memperbaiki distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Parahyangan Economic Development Review*, 2(2), 170–183.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.
- Syafila, S., Wela Aliza, S., Jufani, A. P., & Pangestoeti, W. (2025). *Peran pajak dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia*. <https://yasyahikamatzu.com/>
- Wahyudi. (2023). Pengeluaran pemerintah provinsi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Sebatik*, 27(2), 708–715. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2369>
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan pendapatan dan middle income trap. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2).
- Wirda, R. (2020). Ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia: Analisis data panel. *Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 102–117.